

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penerapan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan dalam kegiatan kegiatan penyusunan perencanaan pada semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Data dan Informasi menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat secara tepat menjawab kebutuhan daerahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan daerah juga mengacu kepada PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, diantaranya adalah pelayanan dasar termasuk perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Implikasinya adalah muncul hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, penerapan kedua undang-undang tersebut, memunculkan paradigma baru manajemen pemerintah, yaitu dari sentralistis menuju sistem desentralistis. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang ada di daerahnya secara lebih optimal.

Terkait dengan penyusunan perencanaan daerah yang perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat, maka dibutuhkan berbagai indikator ekonomi yang mampu memberikan gambaran dan merepresentasikan kondisi ekonomi. Salahsatu indikator ekonomi yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salahsatu indikator ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Angka PDRB merupakan ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi daerah. Dari angka tersebut dapat diturunkan nilai pertumbuhan ekonomi secara umum, bahkan nilai pendapatan per kapita masyarakat.

Terdapat tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB, yaitu: (1) pendekatan produksi (*production approach*), (2) pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), dan (3) pendekatan pendapatan (*income approach*). Ketiga pendekatan tersebut mengacu kepada *System of National Account* (SNA) tahun 1993 yang merupakan standar internasional dan telah ditetapkan oleh PBB.

PDRB yang dihitung dengan melakukan pendekatan produksi merupakan PDRB menurut lapangan usaha. Secara umum, angka tersebut menggambarkan kemampuan berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah di suatu wilayah. PDRB ini telah banyak digunakan oleh konsumen data, baik lembaga maupun perorangan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah menurut sektor ekonomi. PDRB menurut lapangan usaha merupakan gambaran kondisi sisi penawaran (*supply side*) dari suatu ekonomi.

Akan tetapi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi, selain informasi dari sisi penawaran ekonomi, dibutuhkan juga informasi dari sisi permintaan ekonomi (*demand side*). Informasi tersebut dapat diperoleh dari PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut penggunaan menjelaskan bagaimana nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah itu sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah

tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan data PDRB menurut penggunaan merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memperoleh gambaran rinci mengenai kinerja ekonomi daerah, khususnya Kota Samarinda.

PDRB menurut penggunaan juga memperlihatkan komposisi penggunaan/permintaan barang dan jasa, baik dihasilkan di dalam dan dari luar wilayah dalam periode tahun tertentu untuk memenuhi permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan adalah komponen yang terdiri dari :

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak mencari untung (Nirlaba)
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
- Perubahan Inventori
- Ekspor Netto (Ekspor dikurangi Impor)

Permintaan domestik dapat berupa konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu wilayah, mencakup barang dan jasa yang berasal dari dalam dan luar wilayah (impor) tersebut. Maka, dalam penghitungan nilai PDRB menurut penggunaan, ekspor barang dan jasa harus dikurangi dengan impor barang dan jasa untuk memperoleh ekspor neto. Dalam PDRB menurut penggunaan, selisih antara permintaan

(*demand*) dan penyediaan (*supply*) yang mencerminkan perbedaan statistik (*statistical discrepancy*) dicakup dalam perubahan stok (*change in stock*).

Informasi yang diperoleh dari data PDRB menurut penggunaan tersebut diharapkan dapat membantu para perencana, peneliti dan pembaca sehingga lebih dapat memahami kondisi perekonomian Kota Samarinda dari sisi permintaan.

Lebih lanjut, dalam publikasi ini pula juga disajikan beberapa indikator ekonomi makro yang diturunkan dari data PDRB menurut penggunaan. Indikator tersebut adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), rasio ekspor terhadap PDRB, *Marginal Propensity to Consume* (MPC), *Average Propensity to Consume* (APC) dan sebagainya. Lebih lanjut, pada Bab II akan diuraikan mengenai konsep dan definisi, serta metode penghitungan dan estimasi dari nilai tambah menurut masing-masing komponen penggunaan. Bab III berisi gambaran umum mengenai ekonomi Kota Samarinda dari sisi permintaan (*demand side*) serta pembahasan dari beberapa indikator makro turunan. Adapun cakupan periode pembahasan adalah tahun 2006-2009, dimana status data pada tahun 2009 bersifat angka sementara.

## **BAB II**

# **METODE PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN**

### **2.1 Konsep PDRB Menurut Penggunaan**

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan PDRB menurut penggunaan menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang dimaksud merupakan seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu, yang digunakan untuk konsumsi akhir. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi. Oleh karena itu, nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Dalam penyajian, komponen PDRB menurut penggunaan mencakup: (i) pengeluaran konsumsi rumahtangga, (ii) pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, (iii) pengeluaran konsumsi pemerintah, (iv)

pembentukan modal tetap bruto, (v) perubahan inventori, dan (vi) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Pendapatan atas faktor produksi merupakan pendapatan yang disebabkan oleh kepemilikan faktor-faktor produksi (modal, tenaga kerja, dsb) oleh suatu daerah/wilayah. Faktor produksi tersebut bisa berada di luar wilayah tersebut. *Pendapatan netto atas faktor produksi terhadap luar daerah/wilayah* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi yang berada di luar daerah/wilayah yang dimiliki oleh Kota Samarinda dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik kabupaten/kota tersebut yang dimiliki oleh kabupaten/kota lain.

Pendapatan Regional merupakan Produk Domestik Regional Bruto dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha. Secara tidak langsung pajak tersebut dibebankan kepada rumah tangga yang membeli barang dan jasa tersebut. *Penyusutan* adalah berkurangnya nilai barang modal karena proses produksi.

Angka-angka produk domestik regional bruto per kapita dan pendapatan regional per kapita merupakan angka-angka produk

domestik regional bruto dan pendapatan regional bruto setelah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk pertengahan tahun itu sendiri merupakan jumlah penduduk awal tahun ditambah jumlah penduduk akhir tahun kemudian dibagi dengan dua. Kurs asing yang digunakan adalah kurs dolar Amerika. Angka kurs tersebut merupakan kurs tengah yaitu kurs ekspor tertimbang ditambah dengan kurs impor tertimbang dibagi dengan dua.

Penghitungan PDRB menurut penggunaan disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga pada masing-masing tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun 2000.

PDRB menurut penggunaan berdasarkan harga berlaku dapat menjelaskan perkembangan PDRB Kota Samarinda yang mencerminkan perkembangan agregat permintaan juga karena perkembangan/perubahan harga-harga termasuk adanya faktor inflasi. Sedangkan PDRB menurut penggunaan berdasarkan dengan harga konstan, pengaruh kenaikan harga sudah dihilangkan dari

perkembangan PDRB, sehingga merupakan perkembangan riil dari PDRB pada suatu periode waktu tertentu.

## **2.2 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba**

Pengeluaran konsumsi terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa oleh rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba dengan tujuan dikonsumsi, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau tidak terpakai untuk periode satu tahun. Rumahtangga yang dimaksud adalah rumahtangga yang berada pada wilayah Kota Samarinda, baik yang merupakan penduduk Kota Samarinda maupun penduduk kabupaten/kota lain yang sudah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan di Kota Samarinda. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga swasta nirlaba yaitu lembaga swasta yang dalam kegiatannya tidak bertujuan mencari keuntungan.

Yang termasuk pengeluaran rumahtangga adalah pengeluaran untuk makanan (bahan makanan, minuman, rokok, tembakau, dsb), pengeluaran untuk bukan makanan ( barang tahan lama, pakaian, bahan bakar), serta jasa-jasa, termasuk juga barang yang tidak diproduksi kembali, seperti hasil karya seni dan barang antik. Pengeluaran-pengeluaran tersebut, baik untuk makanan maupun

bukan makanan, merupakan pengeluaran untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha rumahtangga. Jika seandainya ada sebagian dari pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka nilai seluruh pengeluaran tersebut harus dikurangi dengan besarnya nilai yang digunakan untuk keperluan usaha tersebut.

Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah dan perbaikan besar untuk rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, melainkan dimasukkan dalam pembentukan modal, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumahtangga.

#### **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Karena keterbatasan data yang tersedia, maka untuk memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dua macam metode estimasi dapat digunakan, yaitu *metode langsung* dan *metode penilaian harga eceran*.

*Metode langsung* digunakan untuk memperoleh nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga secara keseluruhan. Data pokok yang digunakan adalah data Susenas, berupa nilai konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan nilai konsumsi perkapita

sebulan untuk kelompok bukan makanan. Data tersebut berdasarkan harga berlaku. Kemudian dari data Susenas tersebut dibuat perkiraan nilai pengeluaran rumah tangga selama satu tahun. Nilai pengeluaran tersebut kemudian dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mendapatkan nilai pengeluaran rumahtangga berdasarkan harga konstan 2000.

*Metode penilaian harga eceran* digunakan untuk melengkapi kekurangan pada metode langsung. Metode ini dipakai apabila informasi yang tersedia hanya konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum. Nilai konsumsi rumahtangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum dengan harga eceran rata-rata untuk setiap jenis barang.

Sedangkan perkiraan untuk pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba diperoleh dari rata-rata pengeluaran untuk konsumsi akhir lembaga swasta nirlaba di Kota Samarinda.

## **2.3 Pengeluaran Pemerintah**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Pengeluaran Pemerintah**

Pemerintah sebagai konsumen akhir meliputi departemen/dinas/instansi, lembaga bukan departemen di Kota Samarinda termasuk Pemerintah Pusat dan Propinsi yang berada di

Kota Samarinda, serta pemerintah desa. Yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai serta perkiraan penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah).

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, data pengeluaran pemerintah tingkat desa yang diperoleh dari Survei Keuangan Desa serta data-data lainnya yang bersumber dari Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) Kota Samarinda. Pengeluaran konsumsi Pemerintah Kota Samarinda mencakup pengeluaran konsumsi semua unit pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kota Samarinda ditambah pengeluaran konsumsi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

**Pengeluaran untuk belanja barang** yaitu pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Data diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah

belanja pembangunan yang dipindahkan menjadi pengeluaran rutin, karena pengeluaran tersebut menyangkut pengeluaran rutin, seperti pengeluaran pembangunan untuk hankam, proyek pendidikan, dan lain-lain.

**Pengeluaran untuk belanja pegawai** yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran :

- Upah dan gaji dalam bentuk uang dan barang, beserta tunjangannya
- luran dan jaminan sosial
- luran dana pensiun
- Asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, dan sejenisnya

Data ini diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah perkiraan upah dan belanja pembangunan.

**Penyusutan barang modal** yaitu penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal yang lama pada suatu saat sudah tidak dipakai lagi. Angka penyusutan ini diperkirakan sebesar 20 persen dari total belanja modal.

**Pajak tidak langsung** yaitu pajak yang dibayar oleh pemerintah atas kegiatan pada sektor real estate dan pajak atas komoditas yang diproduksi. Data pajak yang dibayar oleh pemerintah sampai sekarang belum tersedia, sehingga perinciannya masih kosong.

**Penerimaan dari jasa** yaitu penerimaan dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Data penerimaan daerah diperoleh dari rasio penerimaan jasa pemerintah pusat terhadap penerimaan produksi barang dan jasa, penerimaan produksi utama (Statistik Keuangan) Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa.

### **Penghitungan Harga Konstan**

- i. Belanja barang menggunakan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tanpa ekspor sebagai deflator, yaitu :

$$\frac{\text{Nilai belanja barang atas dasar harga berlaku}}{\text{IHPB (tanpa ekspor)}}$$

- ii. Belanja pegawai menggunakan indeks jumlah pegawai negeri sipil sebagai ekstrapolator, yaitu:

$$\text{Nilai belanja pegawai 2000} \times \text{indeks jumlah PNS}$$

- iii. Penyusutan diperkirakan sebesar 20 persen dari nilai belanja modal harga konstan
- iv. Penerimaan jasa dan penerimaan barang diperoleh dari persentase penerimaan jasa dan barang terhadap total neraca produksi atas dasar harga berlaku. Nilai persentase ini (sebagai ekstrapolator) dikalikan dengan total neraca produksi atas dasar harga konstan ( i + ii + iii )
- v. Konsumsi pemerintah sebagai residual, yaitu  
( i + ii + iii ) – iv

## **2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai PMTB**

Pembentukan modal tetap bruto adalah pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan pembelian barang-barang modal bekas/baru dari luar negeri/wilayah yang terjadi pada suatu tahun tertentu, dikurangi penjualan barang modal bekas, termasuk juga pengadaan atau pembuatan barang modal serta perbaikan-perbaikan besar yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi. Pembentukan modal di sini termasuk margin perdagangan dan biaya pengangkutan, biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli dari barang-barang modal.

Pembentukan modal tetap domestik regional bruto dirinci atas komponen-komponen barang modal yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, angkutan dan lainnya. Untuk komponen perubahan stok rinciannya tidak ada, karena selain data perubahan stok pada penyusunan PDRB menurut penggunaan merupakan residual, juga data penunjangnya belum cukup tersedia. Barang modal adalah barang atau alat-alat yang digunakan untuk proses produksi dengan umur pemakaian satu tahun atau lebih serta mempunyai nilai relatif besar.

**b. Ruang Lingkup**

PMTB dapat dirinci menurut jenis barang modal yaitu sebagai berikut:

- a) Barang modal berwujud, terdiri dari:
  - i. Bangunan tempat tinggal. Bangunan dicatat sebagai PMTB bila sudah ada kontrak penjualan atau dilakukan sendiri. Bangunan yang belum selesai/jadi yang belum ada kontrak penjualan dicatat sebagai inventori.
  - ii. Bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan lainnya, seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pelabuhan terminal, jaringan pipa untuk minyak dan air, monumen.
  - iii. Mesin dan peralatan, kecuali mesin dan peralatan yang sedang dalam proses pembuatan akan dicatat sebagai inventori.
  - iv. Alat transportasi, kecuali yang sedang dalam proses pembuatan akan dicatat sebagai inventori.
  - v. Cultivated asset. Termasuk didalamnya penambahan ternak (untuk diambil susunya, bulunya atau tenaganya, bukan ternak potong), perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras, tanaman yang hasilnya dapat diambil secara berulang.

- b) Barang modal tidak berwujud, terdiri dari:
  - i. Eksplorasi mineral, meliputi biaya pengeboran, foto udara, biaya transportasi, dan lain-lain.
  - ii. Software komputer, meliputi perangkat lunak dan database yang digunakan dalam proses produksi lebih dari satu tahun.
  - iii. Hiburan, kesusasteraan, benda-benda seni seperti produk film pertama/asli (art original film), program musik, rekaman suara, naskah, program (event) olahraga, dll.
- c) Perbaikan nilai guna tanah
- d) Biaya transfer kepemilikan, meliputi biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi jual beli untuk tanah, subsoil asset, hak paten, patent entities, leases, dll.

**c. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto berupa data :

- i. Output bangunan/konstruksi baik menurut harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
- ii. Indeks produksi industri menurut 5 digit kode KLUI baik triwulanan maupun tahunan.
- iii. Indeks harga perdagangan besar (IHPB).
- iv. Besarnya kuantum dan nilai barang impor menurut SITC.
- v. PDRB sektor jasa-jasa.
- vi. PDRB sektor pertambangan.

**d. Metode Estimasi**

Terdapat dua pendekatan dalam penghitungan estimasi nilai PMTB, yaitu metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditi (*commodity flow approach*). Penyediaan barang tersebut bisa berasal dari produk dalam wilayah maupun produk luar wilayah (impor).

Untuk penghitungan PMTB wilayah Kota Samarinda, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan arus barang (*commodity flow approach*). Estimasi yang dihasilkan adalah pembentukan modal tetap menurut jenis barang yaitu dalam bentuk bangunan, mesin dan alat perlengkapan.

Estimasi pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi baik nilai atas dasar harga berlaku maupun nilai atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan rasio sebesar 0,9157 dari output sektor konstruksi yang merupakan pembentukan modal. Sedangkan

sisanya (0,0843) merupakan perbaikan ringan bangunan/konstruksi yang dianggap bukan merupakan pembentukan modal.

Penghitungan pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan dibedakan atas yang berasal dari impor dan yang berasal dari produksi dalam negeri. Untuk estimasi penghitungan pembentukan modal berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan dari produksi dalam negeri atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi, yaitu dengan menggunakan indeks produksi tertimbang masing-masing jenis barang menurut klasifikasi 5 digit kode KLU. Kemudian untuk mendapatkan nilai berlakunya, nilai konstan tersebut di inflasi dengan indeks harga perdagangan besar tertimbang (IHPB) yang sesuai.

Penghitungan pembentukan modal berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan yang dari impor, nilai konstannya diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks kuantum barang impor.

Indeks tersebut dihitung dengan formula :

$$IQ_t = \frac{\sum Q_t P_o}{\sum Q_{t-1} P_o} \times 100\%$$

dimana :

$IQ_t$  = Indeks kuantum tahun t

$Q_t$  = Kuantum pada tahun t

$Q_{t-1}$  = Kuantum pada tahun t-1

$P_o$  = Harga per unit pada tahun 2000

Kemudian untuk memperoleh nilai atas dasar harga berlaku, dihitung dengan meng inflate nilai konstan dengan indeks harga perdagangan besar barang impor.

## **2.5 Perubahan Inventori**

### **a. Konsep dan Definisi Mengenai Perubahan Inventori**

Inventori didefinisikan sebagai produk barang yang tidak atau belum terpakai pada periode pencatatan. Sedangkan secara khusus inventori adalah barang yang belum terpakai dalam proses produksi atau konsumsi (antara maupun akhir). Inventori ini tersebar di berbagai unit institusi dengan beragam jenis barang inventornya, baik yang dihasilkan sendiri ataupun bukan, baik yang berupa bahan baku dan bahan penolong maupun bukan, baik yang berupa barang tahan lama maupun bukan. Bagi pihak produsen yang menghasilkan inventori, produk ini bisa berupa barang yang belum selesai diproses atau belum terjual.

Perlakuan inventori dalam PDRB ini sedikit agak berbeda dengan komponen-komponen penggunaan akhir lainnya. Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode dengan inventori pada awal periode pencatatan. Hal ini yang menyebabkan perubahan inventori bertanda “positif” atau “negatif”. Bertanda positif apabila nilai inventori pada akhir periode lebih besar daripada awal periode, atau dengan kata lain telah terjadi penambahan. Sebaliknya, apabila inventori bertanda negatif, maka terjadi pelepasan atau pengurangan barang-barang persediaan.

**b. Ruang Lingkup**

Yang digolongkan sebagai inventori adalah persediaan berbagai jenis produk barang yang akan digunakan dalam proses ekonomi lebih lanjut. Penguasa barang inventori bisa perusahaan, pemerintah, rumah tangga maupun masyarakat. Inventori juga mencakup benda-benda berharga yang mempunyai nilai ekonomis.

Klasifikasi inventori menurut penguasaan dan jenis barang dibedakan atas:

1. Inventori yang dikuasai oleh perusahaan, terdiri dari: barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku, bahan penolong dan suku cadang.

2. Stok atau persediaan barang-barang strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan menjaga stabilitas politi-ekonomi dalam negeri, seperti beras, gula, gandum dan kedelai.

Selain itu, inventori juga dapat diklasifikasikan menurut sektor ekonomi (produsen) yang menghasilkan. Lebih lanjut, inventori dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- i. Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi (bahan baku, bahan penolong dan suku cadang).
- ii. Barang yang belum selesai dalam proses produksi (work in process).
- iii. Barang-barang yang belum terjual (yang berada pada pihak produsen atau pedagang).
- iv. Ternak potong seperti sapi, kambing, ayam dan sebagainya.
- v. Tumbuh-tumbuhan yang sekali tebang (seperti pinus, bakau dll.) dan peternakan ikan-ikan yang semuanya diusahakan dan berada dalam pengawasan. Barang tahan lama (durable goods) yang masih dalam proses penyelesaian seperti mesin-mesin, pesawat terbang, kapal laut, kapal penyeberangan dan sejenisnya.

**c. Sumber Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi. Pendekatan korporasi digunakan untuk sektor-sektor antara lain: perdagangan, perhotelan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa. Pendekatan komoditi digunakan untuk sektor-sektor yang data-datanya telah dikumpulkan oleh BPS, seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan industri pengolahan.

Pada pendekatan langsung, data mengenai posisi inventori maupun perubahan inventori dapat diperoleh dari laporan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Sistem yang berbentuk laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dimana transaksi tersebut biasanya dicatat dalam Neraca Akhir Tahun (NAT) pada kelompok transaksi harta (aset) lancar.

Sementara penghitungan dengan metode atau pendekatan tidak langsung data inventori ini bisa diperoleh dari pencatatan lembaga-lembaga atau institusi yang berkepentingan seperti departemen terkait, asosiasi sejenis, pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan.

Apabila data tersedia dalam bentuk nilai, baik posisi maupun perubahannya maka dibutuhkan indeks harga yang akan digunakan sebagai deflatornya. Indeks harga tersebut bersumber dari Indeks Implisit harga PDB, IHPB, IHK ataupun indeks harga lain yang tersedia.

**d. Metodologi**

Terdapat dua pendekatan untuk penghitungan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi, dimana penggunaannya sesuai dengan ketersediaan data.

Pendekatan korporasi dilakukan dengan mencatat perubahan inventori pada unit-unit usaha (perusahaan) yang menguasai inventori, baik yang berupa produk yang dihasilkan sendiri maupun bukan, atau dalam kategori lain, seperti produk yang berupa bahan baku, bahan penolong maupun produk (jadi dan setengah jadi) yang dihasilkannya sendiri tetapi belum dipasarkan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan, masing-masing nilai inventori pada kedua tahun pencatatan di-deflate dengan menggunakan IHPB. Kemudian dihitung selisihnya. Sedangkan untuk nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, dilakukan dengan

meng-inflate nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB yang sesuai.

Pendekatan komoditi dilakukan dengan menghitung nilai inventori (volume dikali dengan harga) masing-masing pada awal tahun dan nilai inventori pada akhir tahun yang sama. Kemudian dihitung selisihnya untuk memperoleh perubahan nilai inventori atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh estimasi harga konstan, setiap volume awal dan akhir tahun dikalikan dengan harga tahun 2000, kemudian mengurangkan nilai akhir tahun tersebut dengan nilai awal tahunnya.

Metode tidak langsung digunakan untuk mengestimasi perubahan nilai inventori pada tahun dimana data belum tersedia. Caranya adalah dengan menghitung perbandingan atau rasio barang yang belum digunakan lebih lanjut (persediaan) terhadap total produksinya, masing-masing pada awal dan akhir tahun.

## **2.6 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Ekspor dan Impor**

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Kota Samarinda dengan penduduk kabupaten/kota lain. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas

barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk kabupaten/kota lain (seperti turis). Begitupun sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar Kota Samarinda oleh penduduk Kota Samarinda merupakan impor.

**b. Ruang Lingkup dan Metode Estimasi**

Ekspor barang dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu minyak dan gas (migas) serta non migas. Ekspor migas dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu: minyak mentah, hasil minyak dan gas. Akan tetapi Kota Samarinda bukan merupakan eksportir migas yang besar. Sedangkan ekspor non migas dikelompokkan kedalam tiga sektor utama, yaitu: hasil pertanian, hasil industri dan hasil tambang dan lainnya.

Impor barang dikategorikan menjadi: impor barang konsumsi, impor bahan baku dan impor barang modal. Lebih lanjut, ekspor dan impor jasa meliputi jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi dan jasa lainnya, seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi barang diluar daerah.

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (fob), sedangkan impor menurut *cost insurance freight* (cif). Baik ekspor maupun impor yang nilainya diperoleh masih dalam satuan kurs \$US, sehingga perlu dikonversikan ke dalam satuan rupiah. Untuk ekspor, konversinya

menggunakan rata-rata kurs beli \$US yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor menggunakan rata-rata tertimbang kurs jual. Hasil estimasi ekspor/impor barang dan jasa yang telah dikonversikan dalam satuan rupiah tersebut, merupakan nilai atas dasar harga berlaku.

Untuk mendapatkan nilai atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai berlakunya dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) masing-masing ekspor maupun impor.

**c. Sumber Data**

Data yang dipakai untuk mengestimasi nilai ekspor dan impor selain bersumber dari BPS, juga dari Bank Indonesia (BI). Nilai ekspor dan impor barang yang diperoleh dari BI berbeda dengan angka dari BPS, hal ini disebabkan perbedaan pencatatan antara BPS dan BI. Pencatatan nilai impor oleh BPS hanya bersumber dari dokumen PPUD, sedangkan pencatatan oleh BI bersumber dari Neraca Pembayaran (BOP). Jadi impor yang dilakukan dengan tidak menggunakan dokumen PPUD tidak tercatat oleh BPS. Sehingga untuk impor barang, data yang diperoleh dari BPS cakupannya diperkirakan masih *underestimate* bila dibandingkan dari data yang diperoleh dari BI.

Namun untuk nilai ekspor barang, angka yang diperoleh dari BPS dianggap lebih baik karena angka ekspor yang dicatat oleh BI berdasarkan pada transaksi finansialnya saja, walaupun barangnya belum diekspor.

## **2.7 Beberapa Penjelasan Mengenai Investasi**

Berdasarkan buku panduan mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut *A System of National Accounts* atau SNA yang diterbitkan oleh *United Nations*, besarnya investasi yang telah direalisasi di suatu negara/ wilayah pada suatu tahun adalah sama dengan jumlah pembentukan modal tetap bruto (PMTB atau *gross fixed capital formation*) dengan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi domestik yang telah direalisasi pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis kapital/modal (*capital*), seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan PMTB lainnya, sedangkan inventori menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, yang dapat berbentuk output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga stok berupa barang jadi yang belum dijual. Inventori termasuk sebagai bagian dari investasi, karena inventori termasuk dalam modal kerja (*working capital*) yang merupakan bagian dari investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok awal dengan stok akhir pada suatu waktu tertentu. Pendekatan penghitungan investasi

melalui konsep PMTB dan perubahan inventori disebut juga sebagai pendekatan arus barang (*commodity flow approach*) atau metode tidak langsung (*indirect method*). Pembahasan investasi pada publikasi ini difokuskan hanya terhadap perkembangan PMTB.

Secara lebih konseptual, PMTB atau *gross fixed capital formation* didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian modal (*capital*) baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri. Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih (oleh karena itu disebut sebagai modal tetap, sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi dengan penyusutan barang modal).

## **2.8 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**

Pengertian ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan tambahan capital (investasi) yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output yang diinginkan. ICOR merupakan suatu ratio (nisbah) antara pertambahan kapital terhadap pertambahan output (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Asumsi ini berlaku apabila dalam kondisi ekonomi stabil artinya dapat berjalan pada kondisi yang kondusif di suatu region (wilayah).

Menurut teori, ICOR dapat diukur melalui bentuk fisik ataupun nilai, namun dalam prakteknya penghitungan ICOR selalu dilakukan melalui bentuk nilai. Sedang asumsi dasar yang digunakan untuk menunjang perhitungan ICOR adalah tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain kapital (investasi) atau faktor lain kecuali investasi yang mempengaruhi output diabaikan.

Formula ICOR :

$$ICOR_{(t_n-t_0)} = \frac{\sum_{t=2000}^{t_n} I_t}{Y_n - Y_0} = \frac{I_{00} + I_{01} + \dots + I_n}{Y_n - Y_0}$$

Dimana :

- ICOR = Laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi
- I = Investasi meliputi PMTB + inventori
- Y = Pertambahan output NTB atas dasar harga konstan.
- $Y_n$  = Pertambahan output NTB atas dasar harga konstan pada tahun n.
- $Y_0$  = Pertambahan output NTB atas dasar harga konstan pada tahun dasar (tahun 2000).

## **2.9 Marginal Propensity to Consume (MPC) dan Average Propensity to Consume (APC)**

### **a. Marginal Propensity to Consume (MPC)**

Marginal propensity to consume (MPC) adalah suatu kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi, didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan konsumsi yang timbul sebagai akibat dari suatu satuan kenaikan pendapatan. Atau dengan kata lain sebagai bagian dari kenaikan pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi.

Persamaan dasar penghitungan MPC adalah

$$\begin{aligned} Y &= C + S \\ \Delta Y &= \Delta C + \Delta S \\ \Delta C / \Delta Y &= \text{MPC dan } \Delta S / \Delta Y = \text{MPS} \\ \text{MPC} + \text{MPS} &= 1 \\ \text{MPC} &= 1 - \text{MPS} \end{aligned}$$

### **b. Average Propensity to Consume (APC)**

Proporsi pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk digunakan oleh suatu wilayah (*region*) untuk berbelanja disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume (APC) (*the essence of the economy*, 2000).

Bentuk formulanya adalah :

$$APC = \frac{\sum \text{Pengeluaran Konsumsi}}{\sum \text{Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan}}$$

dimana :

$$Y = C + S$$

$$C/Y = APC \text{ dan } S/Y = APS$$

$$APC + APS = 1$$

$$APC = 1 - APS$$

### **BAB III**

## **TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2006-2009**

Pada tahun 2009, Kota Samarinda mengalami perlambatan pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 4,82 persen di tahun 2008 menjadi sebesar 4,47 persen pada tahun 2009. Dari sisi penawaran, perlambatan terjadi karena terdapat perlambatan di dua sektor dominan di Kota Samarinda, yaitu sektor Perdagangan dan Jasa-Jasa. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan, pertumbuhan ekonomi yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama empat tahun terakhir, perekonomian Kota Samarinda mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,13 persen. Besaran pertumbuhan tahunan tersebut relatif cukup besar dan hal tersebut mengindikasikan perkembangan ekonomi Kota Samarinda yang cukup stabil dan terus meningkat. Namun demikian, terdapat pula perkembangan besaran inflasi yang cenderung terus meningkat dalam periode yang sama, yaitu rata-rata 8,58 persen per tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena peningkatan laju inflasi yang

berkesinambungan akan berdampak terhadap pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Sehingga agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian terhadap laju inflasi.

Pembangunan perekonomian Kota Samarinda selama tahun 2009 dapat dilihat dari pembentukan nilai tambah bruto selama tahun 2009 mencapai sebesar 21,27 triliun rupiah atau mampu tumbuh sebesar 4,47 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai bukti dari kesungguhan Pemerintah Kota Samarinda dan kerja keras para pelaku ekonomi untuk terus berupaya dan menjaga kondisi wilayah dalam kondisi aman untuk mencapai yang lebih baik.

Perkembangan positif pada ekonomi Kota Samarinda secara umum, juga ditunjukkan oleh adanya peningkatan pada sisi permintaan ekonomi daerah. Indikator yang digunakan sebagai gambaran sisi permintaan adalah PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut penggunaan memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, seperti pengeluaran konsumsi, pembentukan modal, perubahan stok dan ekspor netto.

Lebih lanjut, PDRB menurut penggunaan dapat memperlihatkan kebutuhan untuk investasi (pembentukan modal) yang diperlukan

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdasarkan perencanaan pembangunan Kota Samarinda. Sehingga setiap tahun dapat disusun skala prioritas perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Penggunaan**

PDRB Kota Samarinda tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar 20,27 triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,65 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam harga konstan meningkat sebesar 473 milyar rupiah, dari 10,60 triliun pada tahun 2008 menjadi 11,07 triliun rupiah di tahun 2009, atau tumbuh sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 tersebut bila dilihat dari komponen PDRB Penggunaan diakibatkan adanya kenaikan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) naik 5,39 persen, pengeluaran pemerintah naik 4,89 persen, konsumsi rumah tangga mencapai mencatat kenaikan 4,45 persen, konsumsi lembaga swasta nirlaba naik sebesar 4,18 persen, dan perubahan inventori mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen. Pada nilai ekspor juga mencatat kenaikan sebesar 1,40 persen. Sedangkan permintaan komoditi impor juga mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen pada tahun 2009.

Secara rinci laju pertumbuhan penggunaan dari PDRB Kota Samarinda tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda menurut Penggunaan Tahun 2006 – 2009 (Persen)**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumahtangga	2,24	3,35	5,33	4,45
Konsumsi Swasta Nirlaba	4,70	4,52	4,41	4,18
Konsumsi Pemerintah	5,37	2,82	5,27	4,89
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,53	2,69	5,82	5,39
Perubahan Inventori	4,22	2,50	-1,42	0,29
Ekspor	2,41	0,50	1,84	1,40
Impor	-1,39	-0,26	2,43	1,57
<b>P D R B</b>	<b>5,50</b>	<b>3,11</b>	<b>4,82</b>	<b>4,47</b>

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

### **3.2 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dan Lembaga Swasta Nirlaba**

Pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah pengeluaran konsumsi yang benar-benar dilakukan oleh rumahtangga baik berupa barang maupun jasa. Atau dengan kata lain dalam konsumsi rumahtangga

tidak tercakup pengeluaran konsumsi oleh lembaga swasta nirlaba/lembaga yang tidak berorientasi keuntungan (*profit*). Adapun nilai pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba beserta kontribusinya terhadap total konsumsi dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba Tahun 2006 - 2009**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Nilai (Milyar Rupiah)</i>				
♣ Konsumsi Rumah tangga	5.199	5.814	6.932	7.623
♣ Konsumsi Lembaga Nirlaba	170	182	196	212
Jumlah	5.369	5.996	7.128	7.835
<i>Kontribusi (%)</i>				
♣ Konsumsi Rumah tangga	35,86	36,50	37,24	37,61
♣ Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,17	1,15	1,05	1,05
Jumlah	37,03	37,65	38,29	38,66
<i>Laju Pertumbuhan (%)</i>				
♣ Konsumsi Rumah tangga	2,24	3,35	5,33	4,45
♣ Konsumsi Lembaga Nirlaba	4,70	4,52	4,41	4,18
Jumlah	2,31	3,38	5,31	4,44

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi

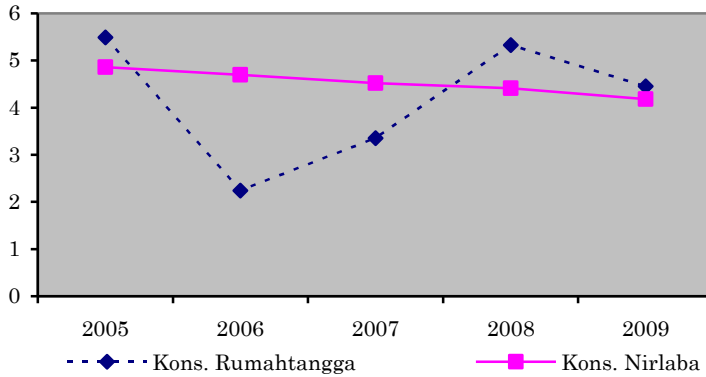
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Bertambahnya jumlah penduduk Kota Samarinda dan meningkatnya harga-harga barang dan jasa serta meningkatnya konsumsi (makanan dan non makanan) per kapita mengakibatkan meningkatnya komponen nilai konsumsi rumah tangga selama tahun 2009, yaitu dari 6,93 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 7,62 triliun rupiah. Begitupun konsumsi lembaga swasta nirlaba (tidak mencari untung) mengalami peningkatan dari 196 milyar pada tahun 2008 menjadi 212 milyar pada tahun 2009.

Secara total nilai konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba terus meningkat tercatat pada tahun 2009 naik 4,44 persen. Ini merupakan indikator bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda sepanjang periode 2006-2009. Selain itu, momen PEMILU dan PILKADA pada tahun 2009 juga menjadi penyumbang terdapatnya peningkatan pada konsumsi lembaga swasta nirlaba dimana Partai Politik menjadi bagian didalamnya. Peningkatan belanja dari berbagai organisasi partai politik bagi keperluan kampanye PEMILU legislatif dan PILKADA tahun 2009. Dimana dengan adanya kegiatan tersebut, sejak pertengahan 2008 organisasi partai politik secara aktif melakukan persiapan-persiapan kampanye, termasuk menyiapkan berbagai atribut kampanye seperti baliho untuk kegiatan sosialisasi calon legislatif dari berbagai partai, dan berlanjut ke kegiatan kampanye untuk kegiatan PILKADA Gubernur.

Selama periode 2006-2008, laju pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga atas dasar harga konstan 2000 cenderung mengalami percepatan. Diawali laju pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2006 yaitu sebesar 2,24 persen, konsumsi rumahtangga meningkat dan mengalami percepatan pada tahun berikutnya yaitu sebesar 3,35 persen. Pada tahun 2007 terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dimana terjadi pertumbuhan pada komponen tersebut sebesar 5,33 persen. Namun di tahun 2009, percepatan tersebut tidak berlanjut, walaupun masih mengalami pertumbuhan positif, terjadi perlambatan dimana terjadi pertumbuhan konsumsi rumahtangga sebesar 4,45 persen. Perkembangan konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba selama tahun 2006-2009 disajikan dalam Grafik 3.1.

**Grafik 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga dan Lembaga Swasta**  
**Nirlaba Kota Samarinda**  
**Tahun 2005 – 2009**



### 3.3 Pengeluaran Pemerintah

Dalam periode tahun 2000-2009, nilai pengeluaran/konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, nilai nominal pengeluaran pemerintah sebesar 1,53 triliun rupiah. Nilai ini terus naik selama empat tahun berturut-turut hingga mencapai 2,42 triliun rupiah pada tahun 2009.

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai pengeluaran pemerintah di tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 217 milyar rupiah. Lebih lanjut, nilai ini menunjukkan adanya peningkatan pada konsumsi pemerintah di tahun 2009 dimana pertumbuhan yang terjadi sebesar 4,89 persen. Namun terjadi perlambatan pada konsumsi pemerintah, dimana persentase pertumbuhan tahun sebelumnya atau tahun 2008 lebih besar yaitu 5,27persen.

Besarnya keperluan konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB menurut penggunaan Kota Samarinda diperoleh dari penjumlahan konsumsi pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan konsumsi Pemerintah Pusat di Kota Samarinda. Komponen PDRB penggunaan ini mencakup pengeluaran konsumsi akhir pemerintah yang terdiri atas pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, upah gaji serta penyusutan barang modal pemerintah.

Konsumsi yang terus meningkat, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini, kemungkinan dipicu oleh semakin meningkatnya aktivitas Pemerintah Kota Samarinda dalam persiapan kegiatan PON 2008 yang telah berlalu, serta kegiatan investasi Pemerintah lainnya. Lebih lanjut, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB Kota Samarinda selama kurun waktu lima tahun terakhir relatif stabil, berkisar 10 hingga 12 persen.

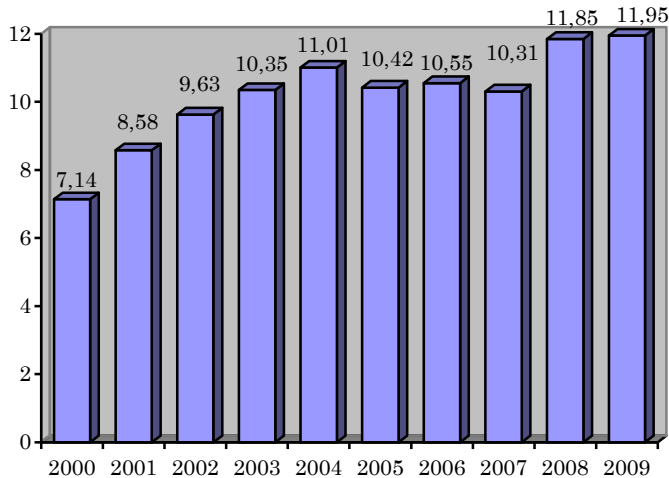
**Tabel 3.3 Pengeluaran Pemerintah Tahun 2006 – 2009**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Berlaku (Milyar Rupiah)	1.529	1.643	2.206	2.423
Nilai Konstan (Milyar Rupiah)	989	1.017	1.070	1.123
Kontribusi (%)	10,55	10,31	11,85	11,95
Laju Pertumbuhan (%)	5,37	2,82	5,27	4,89

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah periode tahun 2006-2009 rata-rata sebesar 4,32 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan tahunan yang cukup baik tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan otonomi daerah yang diterapkan Pemerintah Pusat bagi Provinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Hal ini secara otomatis mendorong meningkatnya belanja barang dan jasa secara rutin, upah gaji dan penyusutan.

**Grafik 3.2**  
**Kontribusi Konsumsi Pemerintah dalam PDRB**  
**Tahun 2000-2009**



### **3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Samarinda atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yakni dari 6,01 triliun rupiah pada tahun 2006 hingga menjadi 7,29 triliun rupiah di tahun 2009. Pembentukan modal tetap bruto ini bersumber dari 5 hal, yaitu: 1) biaya bangunan/konstruksi, 2) mesin dan alat perlengkapannya, 3) perluasan atau penanaman baru, 4) penambahan ternak/unggas untuk dipelihara, dan 5) margin perdagangan termasuk jasa makelar.

Peranan PMTB terhadap PDRB cukup tinggi yaitu 35,94 persen pada tahun 2009. Perkembangan tersebut dilihat dari kacamata ekonomi cukup menggembirakan, karena hal tersebut akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana komponen pembentukan modal tetap bruto yang merupakan komponen dari investasi, semakin berperan dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Samarinda. Namun perlu dicermati, bahwa terdapat kecenderungan penurunan pada peranan komponen tersebut dalam pembentukan PDRB. Hal ini menjadi penting, karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kegiatan investasi akan memberikan manfaat yang lebih serta efek pengganda yang lebih besar terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, dibandingkan

pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh komponen lain seperti konsumsi rumahtangga.

**Tabel 3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto  
Tahun 2006-2009**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai (Milyar Rupiah)	6.014	6.360	6.710	7.286
Kontribusi (%)	41,48	39,92	36,04	35,94
Laju Pertumbuhan (%)	5,53	2,67	5,82	5,82

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, komponen PMTB terus mengalami pertumbuhan positif, walaupun besarnya semakin menurun. Pertumbuhan positif selama periode tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjang bagi kegiatan PON lalu, serta partisipasi pembangunan dunia usaha, berupa pembangunan perumahan, pertokoan serta mall di wilayah Kota Samarinda. Gambaran mengenai laju pertumbuhan komponen PMTB tahun 2001 hingga 2009 disajikan pada Grafik 3.3.

**Grafik 3.3  
Laju Pertumbuhan PMTB Kota Samarinda**

Tahun 2001-2009 (persen)



### 3.5. Ekspor dan Impor

Seperti pada umumnya daerah perkotaan, perekonomian Kota Samarinda lebih didominasi oleh sektor industri dan jasa. Produk dari kedua sektor tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dan dijual keluar wilayah Kota Samarinda, baik itu luar daerah maupun langsung ke luar negeri. Tingginya aktivitas perdagangan produk Kota Samarinda, tercermin pada cukup tingginya kontribusi ekspor selama kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu berada di atas 34 persen.

**Tabel 3.5 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2006-2009**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>EKSPOR</b>				
Nilai (MilyarRupiah)	5.435	5.980	6.771	7.064
Kontribusi (%)	37,49	37,54	36,37	34,85
Laju Pertumbuhan (%)	2,41	0,50	1,84	1,40
<b>IMPOR</b>				
Nilai (MilyarRupiah)	4.327	4.638	4.883	5.087
Kontribusi (%)	29,84	29,11	26,23	25,10
Laju Pertumbuhan (%)	-1,39	-0,26	2,43	1,57

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi

<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Peranan ekspor dalam pembentukan PDRB Kota Samarinda selama tahun 2006-2008 rata-rata sebesar 36,56 persen per tahun. Sedangkan peranan impor rata-rata pertahun sebesar 27,57 persen pertahun. Akan tetapi, peranan ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Samarinda cenderung terus menurun setiap tahunnya.

Apabila diamati lebih lanjut, peranan nilai ekspor dan selama empat tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang terus menurun. Kecenderungan yang sama juga ditunjukkan pada komponen impor, dimana terdapat penurunan peranan selama kurun waktu 2006-2009. Hal tersebut dicermati sebagai suatu indikasi positif, dimana tingkat

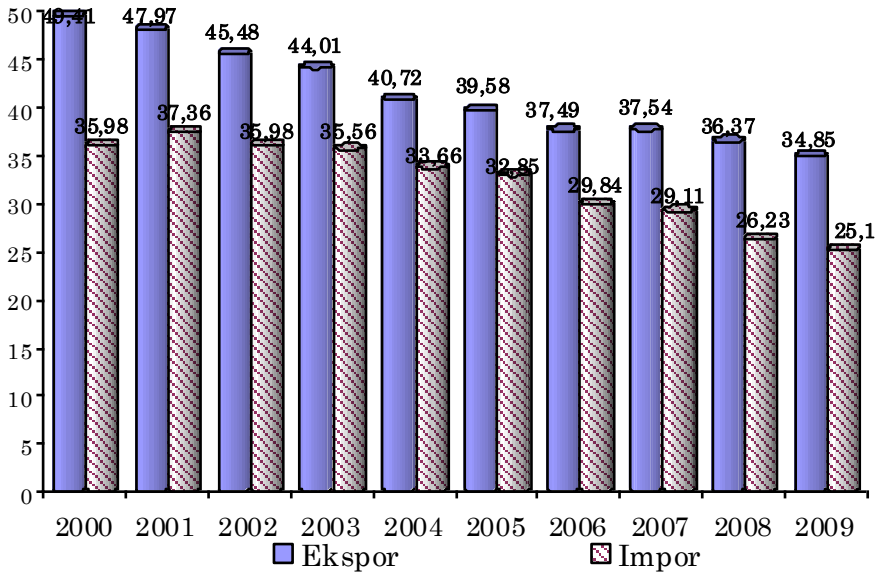
ketergantungan ekonomi Samarinda terhadap ekonomi wilayah lain semakin menurun terutama apabila barang yang diimpor lebih bersifat barang konsumsi.

Dilain pihak, penurunan ekspor juga perlu dicermati dan diwaspadai sebagai semakin berkurangnya pangsa pasar ekspor produk Kota Samarinda. Oleh karena itu, perlu dicarikan alternatif pasar produk Kota Samarinda, terutama domestik, atau perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan daya saing produk lokal Samarinda. Selain itu, perlu juga diteliti faktor penyebab lain penurunan peranan ekspor, seperti masalah distribusi barang, guna menjamin kelancaran pengiriman produk Samarinda ke wilayah-wilayah pemasaran.

Hingga tahun 2007 terjadi perlambatan pada komponen ekspor, hingga pertumbuhan di tahun 2007 hanya sebesar 0,50 persen. Pada tahun 2008 terjadi percepatan ekspor yang dipicu oleh semakin meningkatnya konsumsi masyarakat pendatang di wilayah Kota Samarinda, terutama terkait dengan kegiatan PON bulan Juli 2008, hingga pertumbuhan ekspor mencapai 1,84 persen. Namun kondisi tersebut tidak terus berlangsung, hingga terjadi perlambatan kegiatan ekspor di tahun 2009, sehingga terjadi penurunan besaran persentase pertumbuhan menjadi sebesar 1,40 persen.

**Grafik 3.4**  
**Distribusi Ekspor-Impor Kota Samarinda**

Tahun 2000-2009



Pola yang hampir sama dialami oleh komponen impor, dimana terjadi penurunan pada tahun 2006 dan 2007, yaitu masing-masing sebesar minus 1,39 persen dan 0,26 persen. Pada tahun 2008, terjadi percepatan pertumbuhan komponen impor hingga mencapai 2,43 persen. Kondisi tersebut diperkirakan karena dipicu oleh adanya kegiatan PON 2008 dan kampanye untuk PEMILU dan PILKADA tahun 2009. Kemudian di tahun 2009, terjadi perlambatan hingga kegiatan impor hanya tumbuh sebesar 1,57 persen.

### 3.6 Keterkaitan Ekspor dengan PDRB

Rasio ekspor terhadap PDRB merupakan gambaran dari besarnya peranan ekspor terhadap pembentukan PDRB Kota Samarinda. Rasio ekspor terhadap PDRB di Kota Samarinda selama tahun 2006-2009 mencatat rata-rata sebesar 36,56 persen. Perkembangan rasio ekspor dalam kurun waktu tersebut cenderung terus menurun, yaitu dari 37,49 persen pada tahun 2006 menjadi hanya 34,85 persen pada tahun 2009.

Dalam periode yang sama rasio PMTB terhadap PDRB juga cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 41,48 persen pada tahun 2006 menjadi 35,94 persen di tahun 2009. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh adanya pergeseran struktur ekonomi, dimana terjadi peningkatan peranan konsumsi rumah tangga dalam menggerakkan ekonomi Kota Samarinda. Walaupun terjadi penurunan pada peran, namun dengan pertumbuhan PMTB relatif besar dan cukup signifikan, sebesar 5,39 persen, kegiatan investasi masih tetap berperan penting dalam menggerakkan ekonomi Kota Samarinda.

**Tabel 3.6 Keterkaitan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Terhadap PDRB Tahun 2006-2009**

Uraian	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ratio PMTB terhadap PDRB	41,48	39.92	36.04	35,94

Ratio Ekspor terhadap PDRB	37,49	37.54	36.37	34,85
Ratio PMTB terhadap Ekspor	110,65	106.34	99,09	103,14

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh rasio PMTB terhadap ekspor, dimana terdapat penurunan peranan, walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu dari 110,65 persen di tahun 2006 menjadi 103,14 persen di tahun 2009. Namun kondisi tersebut tidak mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi di Kota Samarinda. Hal ini terbukti dari minat investasi di wilayah Samarinda yang semakin tinggi. Masih terlihat ‘geliat’ ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, dimana terdapat berbagai aktivitas pembangunan properti, seperti pertokoan dan mall yang cukup signifikan.

### **3.7 Keterkaitan PMTB dengan PDRB**

Keterkaitan (hubungan) antara investasi (PMTB ditambah perubahan inventori) dengan PDRB digambarkan oleh suatu ukuran yang disebut dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Ukuran ini merupakan gambaran mengenai tambahan nilai investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan satu unit tambahan PDRB dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah yang dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000. ICOR juga dapat digunakan

sebagai indikator tingkat efisiensi dalam berinvestasi di Kota Samarinda pada periode tertentu.

Perhitungan angka ICOR biasanya bukan dari perubahan kapital dan output tahun per tahun, melainkan dihitung dalam selang waktu yang relatif panjang, misalnya 5 tahun. Sebab penambahan kapital pada tahun ini tidak otomatis diikuti oleh penambahan output pada tahun ini juga, melainkan baru akan muncul pada satu atau dua tahun yang akan datang. Selain itu masa yang dibutuhkan dari waktu penambahan kapital sampai dengan menghasilkan output akan berbeda-beda dari sektor yang satu dengan sektor lainnya. Sebagai contoh penambahan kapital (investasi) pada sektor bangunan akan mendatangkan output paling cepat pada 2–3 tahun yang akan datang. Di sisi lain penambahan kapital (investasi) untuk kegiatan perdagangan, dipastikan akan mendatangkan output dalam jangka waktu kurang dari satu tahun setelah investasi. misalnya 5 tahun.

Selama tahun 2000-2009 ICOR rata-rata Kota Samarinda berkisar antara 4,54 hingga 6,72. ICOR tertinggi terjadi pada periode 2000-2009 mencapai 6,72 dan yang terendah pada periode 2000-2002 sebesar 4,54. Dengan melihat besar ICOR rata-rata antara tahun tahun 2000 sampai tahun 2002 menurun yaitu dari 5,17 menjadi 4,54. Sedangkan antara periode 2000-2002 sampai 2000-2009 cenderung terjadi peningkatan dari 4,54 periode 2000-2002 menjadi 6,72 periode

2000-2009. Hal tersebut menunjukkan perbandingan bahwa penambahan modal yang diperlukan untuk menaikkan output (nilai tambah) pada tahun 2000-2009, lebih tinggi bila dibanding dengan periode tahun 2000-2008 tercermin pada tabel 3.7.

Apabila dibandingkan dengan ICOR Nasional, yaitu berkisar 4,5 hingga 5, ICOR Kota Samarinda selama 4 tahun terakhir lebih besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Samarinda kurang efisien dibandingkan perekonomian Nasional. Namun hal tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik ekonomi Samarinda dengan Nasional, dimana kegiatan investasi di Kota Samarinda mayoritas berada di sektor Konstruksi. Penambahan kapital pada sektor tersebut cenderung baru dapat mendatangkan output pada kurun waktu yang lebih panjang.

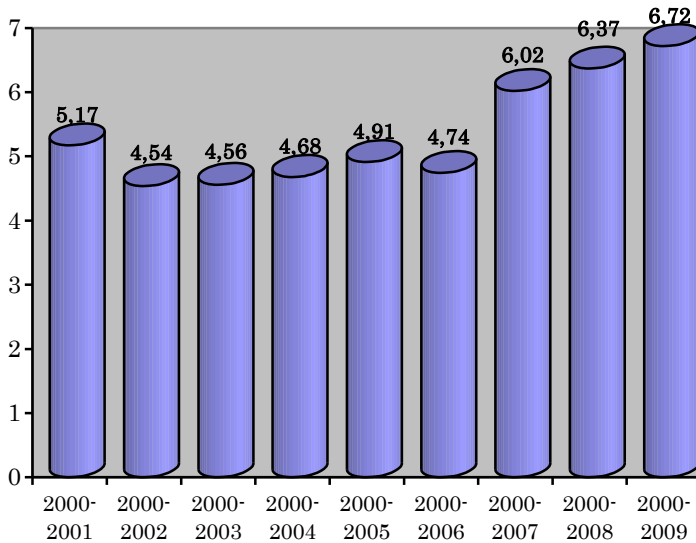
**Tabel 3.7 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)  
Tahun 2000-2009**

Periode	ICOR Rata-rata	Tahun	Investasi (Milyar Rupiah)	ICOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000 – 2001	5,17	2001	2.342,32	5,17
2000 – 2002	4,54	2002	2.776,11	4,12
2000 – 2003	4,56	2003	3.141,95	4,58
2000 – 2004	4,68	2004	3.549,09	5,00
2000 – 2005	4,91	2005	3.971,20	5,74

2000 – 2006	4,74	2006	4.186,73	8,20
2000 – 2007	6,02	2007	4.298,54	14,11
2000 – 2008	6,37	2008	4.523,83	9,29
2000 – 2009	6,72	2009	4.750,30	10,04

Sehingga selama periode 2000-2009 realisasi investasi yang mencapai 35.583 milyar rupiah, terdiri dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 32.669 milyar rupiah dan perubahan inventori sebesar 2.914 milyar rupiah, ikut mendorong kenaikan pendapatan (PDRB) sebesar 4.991 milyar rupiah atas dasar harga konstan pada tahun 2009.

**Grafik 3.5**  
**ICOR Rata-Rata Kota Samarinda**  
**Tahun 2000-2001 sampai 2000-2009**



### **3.8 Kecenderungan Untuk Mengkonsumsi Marginal (MPC) Dan Kecenderungan Untuk Mengkonsumsi Rata-rata (APC)**

#### **1) Marginal Propensity to consume (MPC)**

Bagian dari setiap kenaikan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi barang dan jasa di wilayah Kota Samarinda selama tahun 2001-2009 telah berfluktuasi yaitu antara 0,175 sampai dengan 0,461. Nilai konsumsi yang dimaksud disini adalah merupakan penjumlahan dari nilai konsumsi rumahtangga dan konsumsi lembaga nirlaba.

Nilai MPC tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 0,461, kemudian turun pada tahun 2002 menjadi 0,342 dan turun lagi menjadi 0,297 pada tahun 2003. Sejak tahun 2004 terdapat kecenderungan fluktuasi pada besaran nilai MPC hingga mencapai nilai tertinggi 0,445 pada tahun 2008, namun kemudian menurun kembali menjadi 0,404 di tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa proporsi pendapatan masyarakat yang dibelanjakan untuk barang dan jasa terus berubah.

Penurunan pada tahun 2009 dapat diartikan sebagai arah yang positif, dimana terdapat kecenderungan mengkonsumsi yang semakin menurun. Diharapkan bahwa proporsi pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi tersebut digunakan sebagai tabungan. Apabila demikian, hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Samarinda, dimana tabungan yang dialokasikan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan investasi di wilayah Kota Samarinda, yang dapat berperan sebagai penggerak perekonomian secara keseluruhan.

## **2) Average Propensity to consume (APC)**

Proporsi rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat Kota Samarinda atau disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume = APC*) selama tahun 2000 – 2009 berada pada kisaran 40 hingga sekitar 45 persen. Besaran tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut pola konsumsi masyarakat relatif hampir tidak berubah.

Jadi proporsi pendapatan masyarakat Samarinda yang dapat dibelanjakan konsumsi yaitu berkisar 40 hingga sekitar 45 persen. Selebihnya merupakan tabungan yang mempunyai fungsi dana siap pakai dari rata-rata pendapatan yang diterima dalam periode 2000-2009.

Dari angka APC periode tahun 2000-2009, mengindikasikan bahwa pola penggunaan pendapatan untuk konsumsi dari masyarakat Kota Samarinda relatif tidak berubah. Secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kondisi yang sama terjadi pada pola tabungan masyarakat Kota Samarinda.



**Tabel 1.**

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Penggunaan Kota Samarinda  
Tahun 2006 – 2009 (Juta Rupiah)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.199.297	5.814.354	6.932.207	7.623.440
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	170.266	182.797	196.052	212.889
2. Pengeluaran Pemerintah	1.529.206	1.643.091	2.205.724	2.422.890
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	6.014.302	6.359.660	6.709.731	7.285.546
4. Perubahan Inventori	478.684	588.576	684.592	750.400
5. Ekspor	5.435.449	5.980.313	6.771.287	7.063.882
6. Impor	4.326.957	4.638.140	4.882.711	5.087.359
<b>PDRB</b>	<b>14.500.247</b>	<b>15.930.651</b>	<b>18.616.882</b>	<b>20.271.686</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 2.**

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Penggunaan Kota Samarinda  
Tahun 2006 – 2009 (Juta Rupiah)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>r)</sup>	2008 <sup>r)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.830.762	3.959.011	4.170.223	4.355.779
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	119.453	124.848	130.354	135.804
2. Pengeluaran Pemerintah	988.800	1.016.709	1.070.275	1.122.564
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	3.850.863	3.954.265	4.184.459	4.409.963
4. Perubahan Inventori	335.872	344.274	339.371	340.341
5. Ekspor	4.378.945	4.400.652	4.481.793	4.544.443
6. Impor	3.700.970	3.691.380	3.780.939	3.840.254
<b>PDRB</b>	<b>9.803.725</b>	<b>10.108.378</b>	<b>10.595.535</b>	<b>11.068.640</b>

Keterangan: <sup>r)</sup> Angka Revisi

<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 3.**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Penggunaan Kota Samarinda**  
**Tahun 2006 – 2009 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	35,86	36,50	37,24	37,61
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,17	1,15	1,05	1,05
2. Pengeluaran Pemerintah	10,55	10,31	11,85	11,95
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	41,48	39,92	36,04	35,94
4. Perubahan Inventori	3,30	3,69	3,68	3,70
5. Ekspor	37,49	37,54	36,37	34,85
6. Impor	29,84	29,11	26,23	25,10
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 4.**  
**Indeks Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Menurut Penggunaan Kota Samarinda**  
**Tahun 2006 - 2009 (Tahun 2000=100)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	141,97	146,72	154,55	161,43
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	139,36	145,65	152,07	158,43
2. Pengeluaran Pemerintah	227,82	234,24	246,58	258,63
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	208,61	214,22	226,69	238,91
4. Perubahan Inventori	170,22	174,47	171,99	172,48
5. Ekspor	145,82	146,54	149,24	151,33
6. Impor	169,25	168,81	172,90	175,61
<b>PDRB</b>	<b>161,31</b>	<b>166,32</b>	<b>174,34</b>	<b>182,12</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 5.**  
**Indeks Berantai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Penggunaan Kota Samarinda**  
**Tahun 2006 – 2009 (Tahun Sebelumnya=100)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	104,74	111,83	119,23	109,97
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	107,55	107,36	107,25	108,59
2. Pengeluaran Pemerintah	111,81	107,45	134,24	109,85
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	113,34	105,74	105,50	108,58
4. Perubahan Inventori	107,41	122,96	116,31	109,61
5. Ekspor	104,61	110,02	113,23	104,32
6. Impor	100,34	107,19	105,27	104,19
<b>PDRB</b>	<b>110,47</b>	<b>109,86</b>	<b>116,86</b>	<b>108,89</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 6.**  
**Indeks Berantai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Menurut Penggunaan Kota Samarinda**  
**Tahun 2006 – 2009 (Tahun Sebelumnya=100)**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	102,24	103,35	105,33	104,45
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	104,70	104,52	104,41	104,18
2. Pengeluaran Pemerintah	105,37	102,82	105,27	104,89
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	105,53	102,69	105,82	105,39
4. Perubahan Inventori	104,22	102,50	98,58	100,29
5. Ekspor	102,41	100,50	101,84	101,40
6. Impor	98,61	99,74	102,43	101,57
<b>PDRB</b>	<b>105,50</b>	<b>103,11</b>	<b>104,82</b>	<b>104,47</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi  
<sup>\*)</sup> Angka Sementara

**Tabel 7.**  
**Indeks Implisit PDRB Menurut Penggunaan**  
**Kota Samarinda Tahun 2006 – 2009**

Jenis Penggunaan	2006	2007 <sup>1)</sup>	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>*)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,72	146,86	166,23	175,02
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	142,54	146,42	150,40	156,76
2. Pengeluaran Pemerintah	154,65	161,61	206,09	215,84
3. Pembentukan Modal Domestik Bruto	156,18	160,83	160,35	165,21
4. Perubahan Inventori	142,52	170,96	201,72	220,48
5. Ekspor	124,13	135,90	151,08	155,44
6. Impor	116,91	125,65	129,14	132,47
<b>PDRB</b>	<b>147,91</b>	<b>157,60</b>	<b>175,70</b>	<b>183,15</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Angka Revisi

<sup>\*)</sup> Angka Sementara